

ABSTRACT**AUTHORITY OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF LAMPUNG
PROVINCE IN IMPLEMENTING THE PROTECTION
OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS****By****ANGELINA MISYEL WIJAYA**

An increasing number of Indonesian Migrant Workers (PMI) each year presents serious challenges in terms of labor protection, especially for those employed in the informal sector and classified under “3-D Jobs” (Dirty, Dangerous, Demeaning). These occupations involve high risks, including exploitation, violence, and unsafe working conditions. Protecting non-procedural PMI is particularly difficult, as they operate outside the official placement schemes governed by the state. This study examines the authority of the Regional Government of Lampung Province in safeguarding PMI and highlights the importance of coordination between central and regional governments. This research employs a normative approach, analyzing how regulations (regeling) and administrative decisions (beschikking) took a crucial role in managing the protection of PMI, both before and after their employment abroad. Issues related to the protection of PMI abroad intersect with broader global initiatives aimed at promoting decent work, reducing inequality, strengthening institutional frameworks, and combating poverty. The findings of this study reveal: 1) Protection of migrant workers is structured across five placement schemes, with the independent placement scheme posing specific challenges for regional governments. 2) Migrant workers from Lampung are predominantly engaged in the informal sector and fall under the category of 3-D Jobs (Dirty, Dangerous, Demeaning). Based on their official residency status, regional governments have the discretion to adopt either active or passive measures to address the issues faced by PMIs during their employment abroad.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Sustainable Labor Protection, Regional Government Authority.

ABSTRAK

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Oleh

ANGELINA MISYEL WIJAYA

Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) setiap tahunnya menimbulkan tantangan serius dalam hal perlindungan ketenagakerjaan, terutama bagi PMI yang bekerja di sektor informal dan kategori pekerjaan “*3-D Jobs*” (*Dirty, Dangerous, Demeaning*). Pekerjaan ini selalu diiringi dengan risiko tinggi seperti eksploitasi, kekerasan, dan kondisi kerja tidak layak, sementara perlindungan bagi PMI non-prosedural semakin sulit untuk diberikan perlindungan dikarenakan bekerja di luar skema penempatan resmi pemerintah. Penelitian ini mengkaji kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melindungi PMI, yang menggarisbawahi pentingnya upaya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif, penelitian ini menganalisis bahwasannya regulasi (regeling) dan keputusan administratif (beschikking) berperan penting dalam mengelola perlindungan PMI baik sebelum maupun setelah bekerja. Pelindungan PMI di luar negeri juga bersinggungan dengan inisiatif global yang lebih luas yang bertujuan untuk mempromosikan pekerjaan layak, mengurangi kesenjangan, membina kerangka kelembagaan yang kuat, dan memberantas kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Pelindungan pekerja migran mencakup lima skema penempatan, dengan skema mandiri menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. 2) Pekerja migran asal Lampung bekerja di sektor informal dan termasuk dalam kategori *3-D Jobs* (*Dirty, Dangerous, Demeaning*). Berdasarkan identitas kependudukan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat bersikap aktif atau pasif dalam menangani permasalahan pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan Tenaga Kerja Berkelanjutan, Kewenangan Pemerintah Daerah.